

PENATAAN INFRASTRUKTUR DRAINASE DI KOTA PEKANBARU

PEBRI ANA. S

Email : Pebriana05@yahoo.com

Pembimbing : Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Drainage is a series of buildings that serve water that serves to reduce or remove excess water from an area or land, so that the land can function optimally. In accordance with the regulations of the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia Number 12 Year 2014 on the Implementation of the urban drainage system, which so far has not laid out well because there are many areas that are flooded when it rained. The purpose of this research was conducted to determine how the arrangement of drainage management in Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Permukiman dan Cipta Karya and what factors are inhibiting the development of the current drainage.

In explaining the arrangement of infrastructure management in Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Permukiman dan Cipta Karya, researchers using the theory of G.R. Terry covering planning, organizing, implementing, monitoring. The researchers used a qualitative descriptive method. Data was collected through interviews, observation, literature (collection of documents).

The results showed that the arrangement of drainage management from planning, organizing, implementing and monitoring is well defined. Already there are policies that govern the planning, organization, implementation, and supervision were already performing well, but there are several factors that inhibit the development of drainage, so there are still areas that are still flooded when it rains.

Key Words : Management, Drainage, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Permukiman dan Cipta Karya

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Infrastruktur di daerah juga dapat dikatakan sangat kecil, walaupun sejak dilakukannya desentralisasi/otonomi daerah, pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur meningkat, sementara pengeluaran pemerintah pusat untuk infrastruktur mengalami penurunan yang drastis. Ini merupakan suatu persoalan yang serius, karena walaupun pemerintah pusat meningkatkan porsi pengeluarannya untuk pembangunan infrastruktur, sementara pemerintah daerah tidak menambah pengeluaran mereka untuk pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing, maka akan terjadi kepincangan pembangunan infrastruktur antara tingkat nasional dan daerah.

Infrastruktur adalah sarana yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat dan memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi, sosial budaya dan kesatuan yang mengikat dan menghubungkan antar daerah yang ada tidak hanya

di wilayah Provinsi Riau. Pembangunan Infrastruktur mempunyai peran vital dan mewujudkan pemenuhan hak pada rakyat seperti, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Infrastruktur pusat adalah infrastruktur yang dibangun pemerintah pusat untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam skala nasional, seperti jalan raya antar propinsi, pelabuhan laut dan udara, jaringan listrik, jaringan gas, telekomunikasi dan sebagainya. Infrastruktur daerah adalah infrastruktur yang dibangun pemerintah daerah, seperti penyediaan air bersih, jalan khas untuk kepentingan daerah pariwisata dan sebagainya.

Jenis-jenis Infrastruktur di bagi menjadi 3 bagian besar, yaitu:

1. Infrastruktur keras fisik (Physical Hard Infrastructure) yang meliputi jalan raya, rel kereta api, bandara, dermaga dan pelabuhan, bendungan, dan saluran irigasi, dan sebagainya.
2. Infrastruktur keras nonfisik (NonPhysical Hard Infrastructure) yang berkaitan dengan fungsi utilitas umum seperti ketersediaan air bersih berikut instalasi pengolahan air dan jaringan pipa penyaluran; pasokan listrik; jaringan telekomunikasi (telepon, Internet); dan pasokan energi mulai dari minyak

bumi, biodiesel, dan gas berikut jaringan pipa distribusinya.

3. Infrastruktur lunak (Soft Infrastructure) atau kerangka institusional (kelembagaan) yang meliputi berbagai nilai (etos kerja), norma, serta kualitas pelayanan umum yang disediakan oleh berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah.

Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. Dalam bahasa Indonesia, drainase bisa merujuk pada parit di permukaan tanah atau gorong-gorong di bawah tanah. Drainase berperan penting untuk mengatur suplai air demi pencegahan banjir.

Drainase adalah Prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima Drainase Perkotaan, Drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/ mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat. Drainase Perkotaan Berwawasan Lingkungan Prasarana drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/ mengendalikan air permukaan (limpasan air hujan) sehingga tidak menimbulkan masalah genangan, banjir dan kekeringan bagi masyarakat serta bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup. Sistem Drainase Lokal Kws. Hunian,

Kws. Industri Jalan, Kws. Komersil bagian dari sistem drainase perkotaan yang melayani kawasan jalan kawasan Komersial Hunian Industri. Sistem Drainase Perkotaan Pengendalian Banjir (Flood Control) Penanganan banjir limpasan sungai, Penanganan Drainase akibat genangan air limpasan sungai hujan Wilayah Perkotaan.

Sementara di daerah-daerah pusat perdagangan, drainase kota sering dibuat tersumbat oleh tindakan masyarakat yang membuang sampah ke dalam saluran. Dalam kondisi ini, penyelesaian masalah banjir erat kaitannya dengan penanganan sampah perkotaan. Solusi yang akan dikembangkan ke depan adalah pembenahan aliran air dan normalisasi anak sungai terus dilakukan untuk memperlancar aliran air.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menjelaskan mengenai Drainase yaitu Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan bahwa dalam rangka mengalirkan kelebihan air

yang berasal dari air hujan agar tidak terjadi genangan yang berlebihan pada suatu kawasan tertentu serta seiring dengan pertumbuhan kota dan perkembangan industri, perlu dibuat suatu sistem pengeringan dan pengaliran air yang baik.

Fungsi Drainase itu sendiri adalah sebagai:

1. Untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.
2. Sebagai pengendali air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air/banjir.
3. Menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal.
4. Mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada.
5. Mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir.

Jenis-jenis Drainase Menurut sejarah terbentuknya:

- a. Drainase alamiah (natural drainage), yaitu sistem drainase yang terbentuk secara alami dan tidak ada unsur campur tangan manusia.
- b. Drainase buatan, yaitu sistem drainase yang dibentuk

berdasarkan analisis ilmu drainase, untuk menentukan debit akibat hujan, dan dimensi saluran.

INFORMASI & PERMASALAHAN DRAINASE

Sistem drainase Kota Pekanbaru mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Lokasi saluran pembuangan akhir drainase kota adalah Sungai Siak.
2. Saluran drainase primer adalah anak-anak Sungai Siak.
3. Saluran drainase sekunder dan tersier pada sub basin anak-anak Sungai Siak.
4. Di daerah sub basin yang letaknya dekat dengan sungai siak atau di pinggir Sungai Siak.
5. Sistem drainase kota Pekanbaru umumnya menggunakan sistem gravitasi yang tergantung pada kondisi topografi dan saluran pembuang utamanya yaitu Sungai Siak. Kondisi topografi pekanbaru yang relatif datar menyebabkan sistem pengaliran air hujan tidak dapat terjadi dengan baik dan di beberapa tempat terus dibangun.
6. Jaringan drainase primer yang melintasi kota di antaranya adalah :
 - a. Sungai Siak, sebagai saluran pembuang akhir

dari saluran drainase primer di Kota pekanbaru yang melintang dari barat ke timur terletak di tengah kota. Lebar rata-rata 96 meter dan kedalaman rata-rata 8 meter, dipengaruhi oleh pasang-surut air laut, kecepatan aliran rata-rata 0,75 liter/detik.

- b. Sungai Senapelan merupakan penampung utama bagi wilayah sebelah Barat Jl. Jendral Sudirman dan sebelah utara Jalan T. Tambusai. Lebar rata-rata 3-4 meter.
- c. Sungai Sail, merupakan penampung utama bagi wilayah sekitar Pasar Laket yang dibatasi Jl. Pelajar disebelah barat, Jl. Pepaya disebelah Timur, Jl. Mangga disebelah utara, Jl. T. Tambusai di selatan.
- d. Sungai Sago merupakan penampung bagi wilayah sebelah barat Jl. Sudirman. Sungai lunau, Sungai Tanjung Datuk I dan II.
- e. Sistem drainase yang berfungsi sebagai retention pond adalah rawa-rawa disebelah utara Sungai Siak, sampai dengan batas Jl. Sekolah. Wilayah rawa ini dibagi 2 (dua) oleh Jl. Yos Sudarso menjadi rawa sebelah barat dan rawa sebelah timur.

Pengembangan prasarana drainase dan pengendali banjir

diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Menciptakan lingkungan kota yang bebas banjir dan genangan air.
2. Menata daerah aliran sungai Siak dan anak sungai Siak di wilayah kota Pekanbaru sebagai bagian penting dari unsur kota dengan menjadikannya sebagai orientasi kawasan .
3. Mengoptimalkan dan memadukan fungsi saluran besar, sedang dakecil dan lokasi penampungan air sementara (waduk, situ,) dalam pengelolaan sistem kawasan.

Rencana penanganan darinase ini selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga dilakukan kerjasama dengan pengembang kawasan dalam sekala besar dalam memberikan kontribusi penyediaan sistem pengaliran air hujan baik melalui penyediaan kolam kolam tampungan sementara (parkir air) pada pengembangan sekala besar serta memiliki sistem pembuangan yang terpadu dengan sistem yang sudah ada, maupun kontribusi penyediaan saluran pembuangan. Pengaturan ini perlu diatur lebih lanjut didalam peraturan pengendalian pemanfaatan ruang (*zonning regulation*).

Pengembangan prasarana drainase dan pengendali banjir diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

4. Menciptakan lingkungan kota yang bebas banjir dan genangan air.
5. Menata daerah aliran sungai Siak dan anak sungai Siak di wilayah kota Pekanbaru sebagai bagian penting dari unsur kota dengan menjadikannya sebagai orientasi kawasan .
6. Mengoptimalkan dan memadukan fungsi saluran besar, sedang dakecil dan lokasi penampungan air sementara (waduk, situ,) dalam pengelolaan sistem kawasan.

Berita mengenai permasalahan Drainase yang ada di Kota Pekanbaru:

Diguyur Hujan Sebentar, Ruas Jalan Tergenang
 30 Oktober 2014 - 13.32 WIB
 Persimpangan Jalan Soekarno Hatta-Jalan HR Soebrantas tergenang air hujan dan menyebabkan kemacetan cukup panjang, Rabu (29/10/2014).
 Foto: Teguh Prihatna/Riau Pos
 KOTA (RIAUPOS.CO) - Meski hanya sebentar, hujan lebat yang mengguyur Kota Pekanbaru, Rabu (29/10) siang membuat beberapa ruas jalan tergenang. Seperti yang terpantau Riau Pos di Jalan Sudirman depan RS Awal Bros, depan Gelanggang Ramaja, beberapa titik di Jalan Arifin Achmad dan perempatan Jalan HR Soebrantas-Jalan Soekarno Hatta.

Menurut Tomi (32), warga Marpoyan Damai kepada Riau Pos, setiap diguyur hujan lebat, ruas Jalan Sudirman di depan Gelanggang Remaja kerap banjir dengan kedalaman mencapai 15 centimeter di atas badan jalan.

“Kondisi ini membuat jalan menjadi padat karena pengendara menghindari dari genangan air. Kondisi ini juga terjadi di Jalan Arifin Achmad mulai dari SPBU di pertigaan Sudirman-Jalan Arifin Ahmad sampai pertigaan Jalan Arifin Ahmad-Jalan Paus Ujung,” tutur Tomi.

Genangan air juga terlihat di persimpangan Jalan Soekarno Hatta-Jalan HR Soebrantas. Menurut warga, banjir di wilayah ini selalu terjadi setiap kali hujan karena memang aliran drainase yang tidak jelas.

“Drainasenya saja entah di mana, bagaimana tidak banjir? Drainase itu kan berfungsi untuk mengalirkan air,” ujar pengendara sepeda motor Ardianti (30) yang berhenti di simpang traffic light di dekat Pasar Pagi Arengka kepada Riau Pos, kemarin.

Warga Kelurahan Simpang Baru ini mengatakan hal ini tidak hanya sekali terjadi sudah berulang kali bahkan setiap hujan lebat akan banjir. “Harusnya sudah ada tindakan dari pihak yang berwenang untuk memperbaiki drainase yang tertutup ini,” terangnya.

Hal yang sama diutarakan, Andika (37) yang mengaku sangat terganggu dengan kondisi

tersebut, dan berharap pihak pemerintah segera menangani permasalahan ini. “Kalau serius pasti bisa ditangani, jangan dibiarkan saja, seharusnya pemerintah itu cepat tanggap dengan kondisi ini,” tambahnya.

Camat Tampan Chairani SSTP mengatakan Jalan Soekarno-Hatta simpang Pasar Pagi Arengka tersebut memang dua wilayah kecamatan yakni Tampan dan Marpoyan Damai.

“Di sisi sebelah kiri dari Jalan HR Soebrantas itu masuk wilayah Kecamatan Tampan, sementara sisi sebelah kanan masuk Marpoyan Damai. Namun terlepas dari itu mengenai permasalahan ini kami akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasinya,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi, selain meminta SKPD terkait untuk terus melakukan normalisasi anak-anak sungai dan saluran drainase, ia juga meminta warga untuk turut peduli dengan mengadakan gotong royong di pemukiman masing-masing.

“Partisipasi masyarakat Pekanbaru untuk mengantisipasi musim hujan ini tentu sangat penting seperti misalnya selalu melakukan gotong royong. Bersihkan saluran drainase, baik sampah ataupun yang menghalangi kelancaran aliran air. Sebab ketika sampah dibiarkan atau bahkan dibuang ke dalam saluran drainase dan tentu

akan memicu terjadinya banjir,” ungkapnya. (l/h)

Dari: <http://m.riaupos.co/56617-berita-.html>

Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa sistem drainase yang ada belum berfungsi secara menyeluruh, terutama pada kawasan-kawasan rendah dan cekung. Untuk menanggulangi genangan air hujan tersebut diperlukan perencanaan sistem drainase yang berwawasan lingkungan. Drainase berwawasan lingkungan adalah prasarana yang berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air, dimana pembangunannya terintegrasi dengan Rencana Umum Tata Ruang, pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, pembangunan sarana utilitas kota, serta mempertimbangkan kondisi lingkungan fisik, sosial, dan budaya, sehingga dapat meningkatkan kualitas manusia.

Berdasarkan kondisi di atas masyarakat mengharapkan infrastruktur Drainase yang dapat memperlancar aktivitas masyarakat, membuat masyarakat nyaman, jauh dari penyakit yang dapat menyerang masyarakat akibat genangan air yang timbul akibat saluran drainase yang rusak atau yang tidak ada yang dapat menimbulkan genangan air.

Masyarakat juga menginginkan infrastruktur drainase yang layak untuk digunakan untuk kemajuan

aktivitas perkotaan kota Pekanbaru. Yang dapat mencegah banjir bila musim hujan tiba. Agar pekerjaan atau aktivitas kota berjalan dengan lancar dan nyaman.

Berdasarkan berita diatas Pekanbaru masih memerlukan penanganan serius mengenai Drainase ini. Agar dapat melancarkan sistem perkotaan yang ada. Dan berdasarkan mengenai kondisi Drainase, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Penataan Infrastruktur Drainase di Kota Pekanbaru”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Permukiman dan Cipta Karya. Informan Penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberi keterangan kepada peneliti terkait permasalahan yang diteliti. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data, adalah:

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Studi Pustaka

Teknik yang digunakan penulis ini adalah teknik analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data,

mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya.

PEMBAHASAN

Manajemen yang merupakan sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya. **(G.R. Terry (2006: 4))**

Manajemen di dalam Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Permukiman dan Cipta Karya ini sudah teradministrasi dengan baik, terlihat dari sudah tertatanya kebijakan dan organisasi khusus yang mengatur mengenai drainase ini. Seperti kebijakan yang ada yang mengatur drainase ini adalah Master Plan untuk drainase dan bidang khususnya yaitu bidang Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih yang dibantu oleh Seksi Prasarana Lingkungan dan Seksi Air Bersih.

Seperti yang ada di bahas dalam Review Master Plan ini mengenai Maksud dan tujuan pekerjaan ini adalah melaksanakan Pekerjaan Review Masterplan dan DED Drainase Kota Pekanbaru dalam rangka

penanggulangan banjir / genangan lokal di Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Tampan, Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir.

Dan mengenai Peta Administrasi yang telah di buat oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Permukiman dan Cipta Karya untuk wilayah kerja penanganan drainase Kota Pekanbaru yang sudah di buat dan dimasukkan dalam Master Plan dan DED Kota Pekanbaru. Dan mengenai semua yang mencakup dalam permasalahan dan sampai kepada penanganan mengenai drainase saat ini sudah di atur dalam Master Plan dan DED Kota Pekanbaru.

PERENCANAAN

Dalam manajemen penataan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman, dan Cipta Karya terlebih dahulu membuat kebijakan Master Plan, kemudian juga menuangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dari RPJM bertolak untuk tahunan. Jadi, pada RPJM menetapkan untuk RPJM 5 tahunan (2012-2017) sesuai dengan Visi Misi Walikota, sama dengan masa Dinasnya Walikota Pekanbaru.

Berdasarkan perencanaan mengenai rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya bahwa mereka menentukan rencana apa yang akan di laksanakan untuk kedepannya.

Dan ini lah yang menjadi konsep atau acuan kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Permukiman dan Cipta Karya.

Namun yang menjadi masalah saat ini sehingga terjadinya banjir di Kota Pekanbaru pada titik titik tertentu adalah mengenai kebijakan Master Plan untuk keseluruhan Kota Pekanbaru belum ada.

PENGORGANISASIAN

Dalam hal mengenai pembentukan organisasi manajemen pengorganisasian Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru pihak Dinas sudah mengacu kepada SOTK (Susunan Organisasi Tata Laksana) kepala Dinas, bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman, Seksi Prasarana Lingkungan yang akan menangani drainase.

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi yang menangani mengenai drainase sudah di atur sebelumnya dalam SOTK kepala Dinas, dan tidak membuat organisasi khusus lagi di luar itu.

Mengenai tugas, fungsi dan tata kerja bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman sudah di atur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 84 Tahun 2013 dalam hal tersebut sudah jelas di atur mengenai tugas bidang tersebut dalam penanganan drainase sudah diperdakan dan wajib untuk dilaksanakan dan ada

sanksinya bila tidak terlaksana. Oleh karena itu dalam hal ini dilihat bagaimana kinerja bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya.

Dalam hal ini mengenai kinerja bagian bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman berdasarkan hasil penelitian sudah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing anggota dalam organisasi tersebut, sebagian besar program Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya sudah terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan dalam hal mengenai pengorganisasian ini tidak ada masalah dan organisasi yang bekerja menangani drainase ini dapat kita lihat dari struktur organisasi yang telah di buat oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Permukiman dan Cipta Karya Pekanbaru, begitu juga kinerja anggota dalam Bidang ini tidak ada masalah.

PELAKSANAAN / PENGARAHAN

Dalam hal ini pelaksanaan yang dilakukan setiap tahunnya yaitu melihat atau mencek titik-titik genangan yang paling parah, dan yang paling parah itu yang harus diselesaikan. Mengenai jadwal pelaksanaan dalam upaya

penataan drainase di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa jadwal pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman, dan Cipta karya termasuk bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman sudah di skejulkkan terlebih dahulu.

Jadwal pelaksanaan star awal tahun setelah pembuatan APBD-nya:

- Awalnya memulai dengan membuat time skejul;
- Survei lapangan (mensurvei kegiatan yang akan di laksanakan);
- Lalu di tuangkan dalam APBD kemudian disurvei kelapangan;
- Di Fixkan kondisi lapangan (panjang, lebar dsb);
- Setelah survei nanti baru mulai tender dan lainnya;
- Setelah itu baru dilaksanakan fisiknya.

Jadi berdasarkan susunan diatas skejulnya itu udah tertata dengan baik. awal tahun sudah star mulai dari survei lapangan, hasil survei lapangan (data), datanya di fixasi, setelah fixasi baru diumumkan rencana umum pengadaannya melalui LPSE, kemudian penentu kegiatan nya, pemenangnya ditunjuk, pemenang melaksanakan kegiatan, baru masuk pengawasan dan bagian lainnya lagi baru pelaksanaan.

PENGAWASAN

Dalam hal ini pengawasan itu di mulai pada saat pendataan mulai dilakukan, maka sejak saat itulah pengawasan bersangsiung.

Karna dalam pengawasan ini ada :

1. Konsultan pengawasan;
2. Konsultan perencanaan;
3. Pengawasan Internal dinas sendiri oleh bidang perencanaan dan pengawasan.

Konsultan pengawasan dan Konsultan perencanaan itu Independen dari luar, independen membuat juga laporan berkala untuk Dinas. Independen yang melaksanakan pengawasan lapangan. Namun bukan berarti pengawasan itu hanya dari pihak luar saja, tapi pengawasan internal sendiri juga melakukan pengawasan.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN PENATAAN INFRASTRUKTUR

1. ANGGARAN
2. KONDISI DI LAPANGAN ATAU KONDISI MASYARAKAT
3. KOORDINASI
4. KEWENANGAN

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Drainase merupakan serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan /atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan manajemen yang tepat agar dapat menunjang keberhasilan pembuatan drainase yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Berdasarkan penelitian yang didapat manajemen perencanaan pembuatan drainase saat ini sudah baik, namun ada beberapa faktor yang menghambat proses pembangunan drainase sehingga sering terjadi banjir di Kota Pekanbaru.

2. Mengenai manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya sejauh ini sudah tertata dengan baik. Kebijakan,

organisasi yang melakukan dan pengawasan yang seharusnya dilaksanakan sudah terlaksana dengan baik oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya, Namun karena beberapa faktor yang menghambat keberlangsungan kerja Dinas Pekerjaan Umum yang membuat hasil kerja tidak terlihat sebaik mungkin. Artinya disini mengenai manajemen penataan Drainase sudah tersusun dengan baik.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dibahas diatas, maka peneliti dapat memberi saran bahwa:

1. Diperlukan penanganan – penanganan khusus untuk menyelesaikan faktor – faktor yang dapat menghambat kerjanya pihak dinas tersebut, melalui kerjasama atau musyawarah antar kedua dinas yang bersangkutan.
2. Diperlukan koordinasi yang baik antar pemerintah kota dan pemerintah provinsi agar dapat melaksanakan tugas – tugas dan kewenangan masing – masing dinas pemerintah tersebut agar program yang telah dibuat

dapat terlaksana dengan baik, dan tidak ada tumpang tindih tugas antar dinas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Brantas. 2009. *Dasar – Dasar Manajemen*. Alfabeta: Bandung
- Handoko, T. Hani. 1995. *Manajemen, edisi ke 2*. BPFE – Yogyakarta : Yogyakarta
- Manullang, M. 2005. *Dasar – Dasar Manajemen*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta
- Robbins, Stephen P dan Maru Coulter. 2004. *Manajemen, Edisi ke – 7 (Terjemahan Management, Edition Seventh)*. PT. Indeks Gramedia Group: Jakarta
- Robbins, Stephen P dan Mary Coulter. 2003. *Prilaku Organisasi*. PT. Indeks Gramedia Group: Jakarta
- Sadyohutomo, Mulyono. 2008. *Manajemen Kota dan Wilayah*. Bumi Aksara: Jakarta
- Terry, George R dan W. Rue. 2001. *Dasar – Dasar Manajemen*. Bumi Aksara : Jakarta
- Terry, George R. 2006. *Prinsip – Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara: Jakarta
- Terry, George R dan Leslie W.Rue. 2003. *Dasar – Dasar Manajemen (Terjemahan Principles of Management)*. Bumi Aksara: Jakarta
- Winardi, J. 2004. *Manajemen Prilaku Organisasi*. Kencana Perdana Media Group: Bandung.

**Peraturan
undangan:**

**Perundang-
undangan:**

Peraturan Menteri Dinas
Pekerjaan Umum Nomor 14
Tahun 2010 Tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang
Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang menjelaskan mengenai
Drainase yaitu tersedianya sistem
jaringan drainase skala kawasan
dan skala kota.

Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Sistem Drainase
Perkotaan.

Dokumen:

Dokumen Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru
2007-2026

Dokumen Review Masterplan
Tahap II 2012 pada Dinas
Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru

Website:

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur>

<http://www.zamrudtv.com/filezambar/riau/mediariau.php?module=detailriau&id=6453>

<http://m.riapos.co/56617-berita-.html>